



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



SCAN ME

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 . Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023

ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Makassar, 26 Februari 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR



ACHI SOLEMAN.S.STP.M.Si
NIP.19770831 1995511 2 001
Pangkat Pembina TK I / IV. b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercermin dari evolusi paradigma pemerintahan di Indonesia yang semakin mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang mengatur evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara sistematis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penerbitan SAKIP menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kinerja instansi pemerintah, SAKIP menjadi instrumen yang strategis untuk merespons dinamika tuntutan publik dan global serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan SAKIP Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyajikan panduan yang komprehensif dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini memberikan arah teknis yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perjanjian kinerja terwujud secara efektif, pelaporan kinerja dilakukan dengan transparan, dan proses reviu berlangsung secara akurat. Keseluruhan, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian

kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas: dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

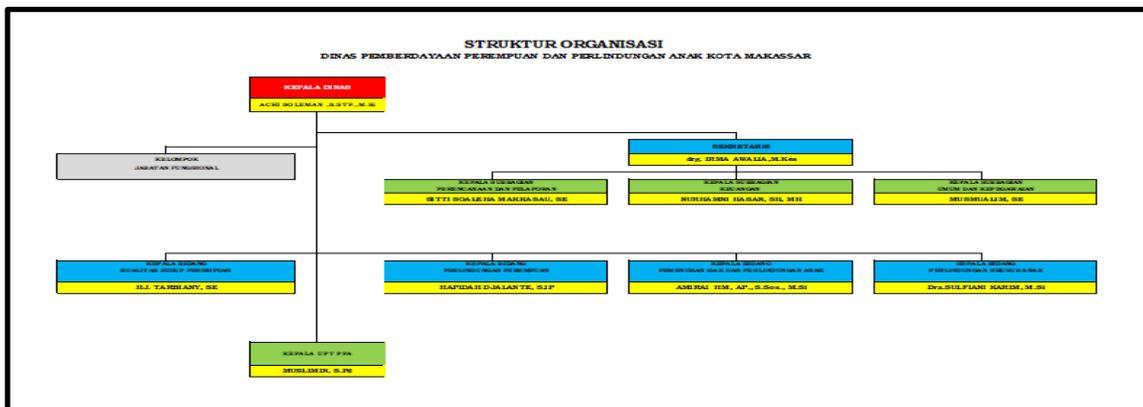
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



B. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2021-2026 sebagai berikut :

- 1.** Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Masih rendahnya komitmen sebagian pembuat kebijakan dalam penerapan isu gender dalam perencanaan dan penganggaran.
 - 2) Minimnya regulasi teknis yang responsive gender.
 - 3) Kelembagaan PUG yang ada, belum dapat berjalan secara efektif, terutama yang ada pada OPD (*Focal Point*).
 - 4) Masih rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kota terkait dengan PPRG.
 - 5) Alat analisis gender belum menjadi instrument utama dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
 - 6) Ketersediaan data pilah gender disetiap SKPD masih terbatas, karena data tersebut belum dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.
 - 7) Kontribusi pihak luar pemerintahan belum maksimal.
- 2.** Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Masih kuatnya pengaruh budaya patriarkhi dalam masyarakat yang menganggap derajat laki-laki diatas perempuan.
 - 2) Masih adanya ketimpangan gender dalam aspek kapasitas SDM yang berpengaruh pada penempatan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan, terutama di Lembaga swasta.
 - 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 4) Keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan perempuan berakibat pada kemiskinan yang menyebabkan terjadinya kekerasan.
- 3.** Permasalahan terkait perlindungan anak;
 - 1) Adanya pandangan orang dewasa yang menganggap anak sebagai makhluk tak berdaya.
 - 2) Masih banyaknya orang dewasa yang tidak mengetahui hak anak.
 - 3) Makin maraknya kasus eksploitasi yang melibatkan anak-anak. (rental anak, kurir narkoba, pedagang asongan, anak yang dilacurkan, dll).
 - 4) Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.
 - 5) Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hal pendampingan terhadap anak.
- 4.** Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- 1) Belum semua Puskesmas di Kota Makassar termasuk kategori Puskesmas Ramah Anak
 - 2) Belum semua sekolah di Kota Makassar termasuk kategori Sekolah Ramah Anak.
 - 3) Masih tingginya angka usia pernikahan anak
 - 4) Masih tingginya angka drop-out sekolah
5. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) di Kota Makassar belum optimal

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya anggaran responsive gender pada SKPD dan kelembagaan PUG
2. Masih Tingginya kasus Kekerasan pada Anak
3. Tingginya Kasus Kekerasan Yang Berbasis Online
4. Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga
5. Belum optimalnya penyediaan dan penyajian data dan informasi gender sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Makassar.

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah:

Visi Kota Makassar
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia
Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kuat untuk
Semua"

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;

2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengacu pada Misi ke-1 dan Misi Kedua, yaitu :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebanyak 5 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pemembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	94,5 1	94,5 3	94,5 5	95	95
		2	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	79,0 2	83,0 2	83,9 4	83,9 6	83,9 6
2	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	46,6 7	64,1 6	81,6 7	100	100

3	Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1.3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	82,84	81,18	79,56	77,97	77,97
				Rasio KDRT	1,39	1,29	1,19	1,09	1,00
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
				Cakupan perempuan	100	100	100	100	100

		dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD					
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	17,9 4	18,1 9	18,2 7	18,5 4	18,5 4
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan	96,7 9	97,1 7	97,3 2	97,5 7	97,5 7

			terhadap perempuan dan anak					
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	86,9 6	91,8 7	96,7 1	97,3 3	97,3 3
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	1.4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di berbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	54,9 0	69,9 3	84,9 7	100 100
5	Meningkatkan ketersediaan data dan	1.5	Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan	Persentase ketersediaan data dan informasi	85,5 7	87,5 7	89,5 7	91,5 7 91,5 7

	informasi gender dan anak		kebijakan publik	gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak					

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	1.1. Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	Persen Persen	$(x = \frac{SKPD \text{ yang menerapkan PPRG}}{SKPD \text{ yang ditargetkan menerapkan PPRG}} \times 100\%)$ $SKPD \text{ yang mengikuti ARG}$ $= \frac{\quad}{Jumlah SKPD} \times 100\%$	Data SKPD Yang Telah mengikuti pelatihan ARG
2	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	2.1 Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	Persen	$(x = \frac{Jumlah PKRT \text{ yang diberdayakan}}{Target PKRT \text{ Yang diberdayakan}} \times 100\%)$	Data DP3A.

				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan Pelaporan yang masuk keunit pelayanan terpadu}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadu Kota Makassar
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih Bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah perempuan dan anak yang mendapat rehabilitasi sosial}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadu Kota Makassar
				Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah perkara yang diputus pengadilan dengan dasar perundang undangan yang terkait kekerasan perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadu dan pengadilan Kota Makassar

				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadau Kota Makassar
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak yang tercatat di UPTD}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadau Kota Makassar
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Presentase	$\left(x = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lain}}{\text{Jumlah perempuan dan anak yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\% \right)$	Data Dari UPPPA Dan layanan terpadau Kota Makassar

4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak di berbagai bidang		Persentase Kelurahan Ramah Anak	persen	$x = \frac{\text{Jumlah Kelurahan Ramah Anak}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	Data Dp3A
5	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak	Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik		Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	persen	Jumlah presentase ketersediaan data gender dan anak yang tersedia	Data Dp3A

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan		Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	Persen	94,53
			Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	Persen	83.02
2	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	Persen	64,16

3	Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	Persen	81,18
			Rasio KDRT	Persen	1,19
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	Persen	100

		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	Persen	18,27
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	97,32
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	96,71
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi	Persen	100

				perempuan dan anak korban kekerasan		
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak		Meningkatnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di berbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	Persen	69,93
5	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak		Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	Persen	87,57

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kota Makassar tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	Persen	94,53
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	Persen	83.02
2	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	1.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	Persen	64,16
3	Meningkatkan layanan perlindungan	1.2 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap		Persen	81,18

perempuan dan anak dari tindak kekerasan	perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan		
		Rasio KDRT	Persen	1,19
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	Persen	100
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh	Persen	18,27

		petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	97,32
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	96,71
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100

4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak		Meningkatnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di berbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	Persen	69,93
5	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak		Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	Persen	87,57

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Makassar Tahun 2023

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prsentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	6.558.462.200
		Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	
		Presentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan kapasitas	90%	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Presentase Anggaran Responsive	60%	3.746.978.000

	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Gender (ARG) Pada Belanja Langsung		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk perempuan	82,84	1.330.258.900
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	46,67%	715.369.200
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase data indikator pengurusan gender (IPG) yang tersedia	85,57%	511.025.400
		Presentase data komponen	94,51	

		indeks pembangunan gender (IPG) yang tersedia		
		Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	79,02	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Kelurahan Ramah anak	54,90	1.098.102.400
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak Korban Kekerasan yang ditangani	97,84	2.812.952.900

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan strategis yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	Persen	94,53
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	Persen	83,02
2	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	1.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	Persen	64,16
3	Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1.2 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	Persen	81,18

		Rasio KDRT	Persen	1,19
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	Persen	100
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	Persen	18,27

		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	97,32
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	96,71
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di berbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	69,93

5	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak		Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	persen	87,57
---	--	--	--	---	--------	-------

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prsentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	5,963,541,169
		Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja	100%	

		perangkat daerah		
		Presentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan kapasitas	90%	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsive Gender (ARG) Pada Belanja Langsung	60%	984,879,700
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk perempuan	82,84	2,251,737,700
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang	46,67%	715,042,800

		mendapat pemberdayaan		
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase data indikator pengurusan gender (IPG) yang tersedia	85,57%	170,360,500
		Presentase data komponen indeks pembangunan gender (IPG) yang tersedia	94,51	
		Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	79,02	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Kelurahan Ramah anak	54,90	1,486,762,600
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak Korban Kekerasan yang ditangani	97,84	3,533,632,100

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

Pada tahun 2023 Anggaran Pokok sebesar Rp 16.773.149.000 dan pada anggaran perubahan anggarannya sebesar Rp 15,105,956,569 adanya pergeseran pagu pada belanja di program dan kegiatan dan adanya pengurangan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan						
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	94,53	90	95%	cukup	DP3A
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	83,02	80,59	97%	cukup	DP3A
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender						
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	64,16	63,15	98%	cukup	DP3A

3	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	81,18	81,18	100%	Baik	DP3A
		Rasio KDRT	1,29	0,01	100%	Baik	DP3A
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100%	baik	Data UPTD PPPA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	100	100	100%	baik	Data UPTD PPPA

		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	18,19	18,19	100%	baik	Data UPTD PPPA
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	97,17	97,17	100%	baik	Data UPTD PPPA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	91,87	91,87	100%	baik	Data UPTD PPPA
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%	baik	Data UPTD PPPA

		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%	baik	Data UPTD PPPA
4	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anakdiberbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	69,93	68	97%	cukup	DP3A
5	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak						
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	87,57	84,17	96%	cukup	DP3A

Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatnya indeks Pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang terpenuhi

Dalam hal peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang mana indikator kinerja sasaran adalah presentase data komponen indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi dimana pada tahun 2023 yang mendukung tujuan dan sasarannya adalah Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam program terdapat beberapa kegiatan yang indicator kinerjanya adalah Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender. Yang mana indeks pembangunan gender yang targetnya ditahun 2023 94,53 dan realisasi ditahun 2023 90% pencapaian realisasinya adalah 95% dan indeks pemberdayaan gender ditahun 2023 capaian nya adalah 97 % dan kategorinya adalah cukup ini berarti bahwa untuk meningkatkan kategori baik perlunya peningkatan kualitas perempuan dibidang politik dan perlunya pemerataan dalam hal sector Pendidikan dan ketenagaa kerjaan

2. Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender yang mana sasarannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga yang mana indicator kinerjanya adalah presentase perempuan kepala keluarga yang mendapatkan pemberdayaan ditahun 2023 target nya adalah 64,16% dan realisasinya adalah 63,15% dan capaian kinerjanya adalah 98 % kategorinya adalah cukup hal ini dapat ditingkatkan dalam hal perlunya peningkatan kualitas perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam hal ini perempuan kepala keluarga agar dapat meningkatkan kualitas keluarganya.
3. Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan dimana indicator kinerjanya ada 9 indikator yang mana indikator kinerjanya kategori baik ini karena adanya layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sampai selesai kasus oleh UPTD PPA .
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Khusus Anak indicator yang kategorinya cukup
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang indicator kinerjanya kategorinya cukup

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan							
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	94,51	94,51	100%	94,53	94,53	100%
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	79,02	79,02	100%	83,02	83,02	100%
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender							
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase Perempuan Kepala Keluarga	46,67	45,67	98%	64,16	63,15	98%

	dalam perwujudan ketahanan keluarga	(PEKKA) yang mendapat pemberdayaan							
3	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan								
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	82,84	82,84	100%	81,18	82,84	100%	
		Rasio KDRT	1,39	1,39	100%	1,29	1,29	100%	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100%	100	100	100%	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	100	100	100%	100	100	100%	

		penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD						
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	17,94	17,94	100%	18,19	18,19	100%
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	96,79	96,79	100%	97,17	97,17	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	86,96	86,96	100%	91,87	91,87	100%

		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%	100	100	100%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%	100	100	100%
4	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak							
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak di berbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	54,9	54,9	100%	69,93	69,93	100%
5	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak							
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	85,57	85,57	100%	87,57	87,57	100%

Berdasarkan data diatas bahwa indicator ditahun 2022 dan indicator ditahun 2023 tidak mengalami penurunan dan kenaikan indicator kinerjanya sama

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar periode 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan				
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	94,53	95	100%
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	83,02	83,96	99%

2	Tujuan :Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender				
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	63,15	64,5	98%
3	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan				
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	81,18	77,97	96%
		Rasio KDRT	1,29	1	78%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	100	100	100%
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	18,19	18,54	98%

		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	97,17	97,57	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	91,87	100	92%
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%
4	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak				
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anakdiberbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	69,93	100	70%
5	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak				
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	87,57	91,57	96%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat kemajuan indicator kinerja presentase data komponen indeks pembangunan gender sebesar 100%
Tingkat kemajuan indicator kinerja presentase data komponen indeks pemberdayaan gender sebesar 90%
2. Presentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan sebesar 98%
3. Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPP0 penduduk perempuan 96%
4. Presentase kelurahan ramah anak sebesar 70%
5. Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak sebesar 96%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan				
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pembangunan gender yang terpenuhi	94,53	94,53	100%
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	83,02	83,02	100%
2	Tujuan :Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender				
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	64,16	63,15	98%
3	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan				
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	81,18	81,18	100%
		Rasio KDRT	1,29	1,29	100%

		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD	100	100	100%
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD	18,19	18,19	100%
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	97,17	97,17	100%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	91,87	91,87	100%
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%

		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100%
4	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak				
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anakdiberbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak	69,93	69,93	100%
5	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak				
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	87,57	87,57	100%

Uraian penjelasan tabel :

1. Capaian indicator kinerja indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender sebesar 100 %
2. Capaian indicator kinerja Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan sebesar 98%
3. Capaian indicator kinerja Prevalensi kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan sebesar 100%

Rasio KDRT sebesar 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebesar 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPTD sebesar 100%

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%

4. Capaian indicator Presentase kelurahan ramah anak sebesar 100%
5. Capaian indicator kinerja Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak 100%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	sasaran : Tersedianya Tersedianya Sistem administrasi Perkantoran tertib dan lancar						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	MENUNJANG

				HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA			
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	MENUNJANG
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	MENUNJANG
				kegiatan : Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	MENUNJANG
				Kegiatan : Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasia n Kepegawaian Perangkat Daerah	100	MENUNJANG
				Administras i kepegawaia n perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasia n Kepegawaian Perangkat Daerah	94,1	MENUNJANG
				Administras i Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasia n Umum Perangkat Daerah	65,85	MENUNJANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	100	MENUNJANG

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	100	MENUNJANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	100	MENUNJANG
2	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan						
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender	Presentase data komponen indeks Pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang terpenuhi		Program : Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	90	MENUNJANG

				Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota makassar yang dilaksanakan	98	MENUNJANG
				Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	96,48	MENUNJANG
3	Tujuan :Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender						
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang		Program : Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase Perempuan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pemberdayaan	97,75	MENUNJANG

	ketahanan keluarga	mendapat pemberdayaan					
				Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/kota	Jumlah Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak Anak tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan kualitas	97,75	MENUNJANG
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/kota	Jumlah SDM Lembaga Layanan Keluarga yang Terlatih	100	MENUNJANG
4	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan						

	dan anak dari tindak kekerasan						
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan-an- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan		Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO- per 100.000 penduduk perempuan	100	MENUNJANG
				Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	Capaian Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	100	MENUNJANG
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Capaian Layanan Perlindungan Perempuan	100	MENUNJANG

				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	98,46	MENUNJANG
5	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak diberbagai bidang	Persentase Kelurahan Ramah Anak		Program Pemenuhan Hak Anak		97,4	MENUNJANG
				Kegiatan : Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	97,99	MENUNJANG

				Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	99,49	MENUNJANG
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansit erkait	95,18	MENUNJANG
				Keguatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Kota Makassar yang disediakan	95,18	MENUNJANG

				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	97,14	MENUNJANG
6	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak			Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data indikator Pengarusutamaan Gender yang Tersedia	85,75	MENUNJANG
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak			Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender(IPG) yang tersedia	95,51	MENUNJANG

					Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	79,02	MENUNJANG
				Kegiatan : Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data Ditingkat Kota Makassar Yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis dan Disajikan	100	MENUNJANG

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata sudah mencapai target dan ditetapkan dalam kriteria tinggi. Untuk selanjutnya di tahun yang akan datang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku yang mendukung akan melakukan strategi dalam hal edukasi dan pelayanan.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Present ase
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15,105,956,569	13,528,287,079	90,38
I.	Program Penunjang Urusan Pemerinth Daerah Kabupaten/ Kota	5,963,541,169	4,777,287,128	82,13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235,923,800	41,226,920	71,12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,544,748,979	3,635,953,628	80
3	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	156,600,000	148,531,720	96,16
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351,893,000	338,027,000	96,05
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238,669,590	210,250,000	73,23
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186,687,800	172,229,610	92,25
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249,018,000	231,068,250	92,27
II.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	984,879,700	911,703,000	92,57
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	155,922,500	111,950,000	71,80
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	828,957,200	799,753,000	96,48
III.	Program Perlindungan Perempuan	2,251,737,700	2,198,989,972	97,65
1	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	638,714,600	625,086,000	97,86
2	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	622,145,600	605,552,972	97,33
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan	990,877,500	968,351,000	97,72

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Present ase
	perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota			
IV.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	715,042,800	631,724,606	88,94
1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/kota	588,814,800	512,454,606	87,03
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraag Gender dan Hak Anak Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/kota	126,228,000	119,270,000	94,48
V.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	170,360,500	167,293,800	98,19
1	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota	170,360,500	167,293,800	98,19
VI.	Program Pemenuhan Hak Anak	1,486,762,600	1,474,179,290	99
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	712,012,600	705,032,290	98,71
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	774,750,000	769,147,000	99,27
VII.	Program Perlindungan Khusus Anak	3,533,632,100	3,367,109,283	92,28
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,459,042,700	415.520.200	95,45
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,589,400.	65,272,000	87,50
	J U M L A H	15,105,956,569	13,528,287,079	90,38

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
1	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	sasaran : Tersedianya Tersedianya Sistem administrasi Perkantoran tertib dan lancar									TIDAK EFISIEN
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	90	100%	100%	1026268390	951574860	93%	93 %	TIDAK EFISIEN

	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	100%	4780672779	3803748728	80%	80%	TIDAK EFISIEN
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90	90	100%	100%	156600000	148531720	95%	95%	TIDAK EFISIEN
2	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan									
	Sasaran : Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender									
	Persentase data komponen indeks pembangunan gender	94,53	94,53	100%	100%					

	yang terpenuhi									
	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang terpenuhi	83,02	83,02	100%	100%	984879700	911703000	93%	93%	TIDAK EFISIE N
3	Tujuan :Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender									
	Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga									
	Presentase Perempuan kepala keluarga yang mendapatkan pemberdayaan	64,16	63,15	98%	98%	715042800	631724606	88%	90%	TIDAK EFISIE N
4										
	Tujuan : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan									

	dan anak dari tindak kekerasan									
	Sasaran : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO									
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan- termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	81,18	81,18	100%	100%	2251737700	2198989972	98%	100 %	EFISIE N
5	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak									
	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak - hak dan perlindungan anak diberbagai bidang									
	Prevalensi kelurahan ramah anak	69,93	69,93	100%	100%	5020384700	4839126573	96%	96 %	TIDAK EFISIE N

5	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak									
	Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public									
	Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di semua OPD dan Lembaga Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	87,57	87,57	100%	100%	170360500	157693800	100%	100%	EFISIEN

Uraian penjelasan tabel :

Pada capaian indicator tabel diatas bahwa ada beberapa sasaran indicator yang capaiannya tidak efisiensi dan ada indicator yang efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menetapkan sebanyak xx tujuan, xx sasaran dengan xx indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatkan capaian Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan keluarga indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98% (kategori Tinggi)
- Sasaran : Tersedianya profil gender dan anak yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan public dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Makassar.

Makassar, 26 Februari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
MAKASSAR



ACHI SOLEMAN, S, STP, M.Si

Pangkat. Pembina TK.I

NIP. 19680412 199603 2 005